

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Dinas Perkebunan	PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 83.127.000,-	Rp. 61.150.600,- (72,44%)	1. Silpa pada belanja jasa tenaga administrasi karena dirumahkannya THL pada bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 atau selama 4 bulan sehingga honorarium tidak dibayarkan dan tidak semua THL dipanggil kembali untuk bekerja pada bulan Oktober 2021	Tidak ada	

							2. kurangnya pertemuan untuk sinkronisasi dan koordinasi antara instansi terkait karena PPKM kasus pandemi covid19 sehinggaterdapat perbedaan data diantara instansi pemerintah (Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI dan BPS)	2. Melakukan pengentrian pada Satu Data Pasaman Barat Diskominfo sebagai data publikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan data terkait perkebunan	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.484.703.655, -	Rp. 4.314.700.115, - (95.44%)	1. Terputusnya SK pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) selama 4 (empat) bulan dan tidak semua THL dipanggil kembali untuk bekerja pada bulan Oktober 2021	Tidak Ada	

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 25.700.000,-	Rp. 23.300.000,- (90,66%)	Tidak ada	Tidak ada	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	Tidak terlaksana karena anggaran hilang pada refocusing		

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 212.606.860,-	Rp. 176.237.653,- (91,72%)	Tidak ada	Tidak ada	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 41.390.870,-	Rp. 39.334.500,- (95,03%)	Tidak ada	Tidak ada	

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 101.688.300,-	Rp. 95.140.900,- (94,56%)	Tidak ada	Tidak ada	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 131.535.000,-	Rp. 116.326.525,- (88,67%)	Tidak ada	Tidak ada	

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 26.817.500,-	Rp. 25.059.750,- (93,45%)	Kegiatan ini merupakan pendamping kegiatan APBN atau APBD I. Tahun 2021 tidak ada kegiatan APBN atau APBD I, sehingga kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk monitoring pupuk bersubsidi dan bantuan kegiatan sarana dan prasarana tahun sebelumnya	Kegiatan ini sebaiknya dimunculkan ketika terdapat kegiatan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN dan APBD I, sehingga kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dapat dimaksimalkan	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 332.022.205,-	Rp. 320.825.424,- (96,63%)	Untuk green house dan skadilot bahan-bahan yang ada sudah banyak yang tidak bisa dirawat (rapuh) hanya dilakukan pembersihan tempat	Perlu dianalisa oleh konsultan untuk anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan dan penggantian bahan yang tidak bisa dipakai	Dinas Perkebunan agar melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan produksi komoditi unggulan Kabupaten Pasaman Barat

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 59.221.500,-	Rp. 51.527.300,- (87,01%)	Silpa berasal dari anggaran honor THL yang tidak dapat dibayarkan	Tidak ada	Pada Dinas Perkebunan perlu dibuatkan program dan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet terutama pengadaan kecambah
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 4.646.273.639, -	Rp. 4.597.772.400, - (98,08%)	Kegiatan ini bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat sehingga dalam penerima manfaat jalan produksi tersebut kelompok tani belum terdaftar di Simluhtan	Anggota DPRD dalam menentukan penerima manfaat jalan produksi sebaiknya berkoordinasi dengan penyuluh perkebunan di lapangan agar kelompok tani penerima manfaatnya telah terdaftar di Simluhtan	

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 39.685.000,-	Rp. 32.585.400 (82,11%)	Silpa berasal dari anggaran honor THL yang tidak dapat dibayarkan	Tidak ada	
--	--	--	---------------------------------------	--	---------------------	----------------------------	--	-----------	--

			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Rp. 233.791.000,-	Rp. 166.355.750 (73,44%)	<p>1. Kegiatan supervisi dan training penyuluhan pertanian tidak berjalan secara maksimal karena adanya pandemi covid 19 serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>2. Pembayaran Honorarium tenaga Penyuluh pertanian kontrak tidak dapat dilakukan seratus persen karena adanya pemberhentian sementara tenaga penyuluh kontrak beberapa bulan.</p> <p>3. Kegiatan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh tidak bisa dianggarkan karena reconfusing anggaran.</p>	<p>1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara lisan maupun melalui seluler kepada penyuluh tentang kelengkapan administrasi penyuluh dan juga tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja penyuluh masing masing sebagai bagian dari pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian</p> <p>2. Memberikan materi tentang pelaksanaan penyuluhan, budidaya maupun penanganan hama dan penyakit pada komoditi tanaman perkebunan melalui wa grup.</p>	
--	--	--	---------------------------------------	---	----------------------	--------------------------------	--	---	--

							<p>4. Terlambatnya Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Dinas Perkebunan Pasaman Barat Tahun 2022 karena pertemuan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian baru dilaksanakan setelah dianggarkannya dana pertemuan penyusunan programa penyuluhan pertanian pada waktu perubahan Anggaran yaitu sekitar bulan September 2021.</p> <p>5. Minimnya anggaran untuk pembinaan kelompok tani maupun kelompok wanita tani peserta pengarusutamaan gender Dinas Perkebunan.</p>	<p>3. Mengikutsertakan penyuluh pertanian pada kegiatan zoommeeting yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sehingga dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap penyuluh.</p> <p>4. Mengutus beberapa orang penyuluh untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera barat yaitu: temu Teknis Pengembangan Profesi, Temu Teknis Penyuluh dan Temu Evaluasi Penyuluh.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

- | | |
|---|--|
| <p>6. Adanya aturan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat di tahun 2021 karena masa pandemi dimana tidak boleh mengumpulkan orang banyak sehingga menyulitkan untuk melakukan pembinaan administrasi di kelompok tani.</p> | <p>5. Melakukan pembinaan administrasi kelompok dengan melakukan kunjungan pada pengurus kelompok tani, dimana kepala bidang/kasi dan satu orang staf mengunjungi pengurus kelompok tani untuk dilakukan pembinaan untuk pembuatan administrasi yang baik dan benar.</p> <p>6. Koordinasi secara intensif dengan tim penyusun program penyuluhan pertanian Dinas Perkebunan untuk penyusunan program penyuluhan pertanian.</p> <p>7. Memberikan Leaflet tentang Dinamika Kelompok Tani pada kelompok tani maupun KWT</p> |
|---|--|

2	Perdagangan	Dinas Perkebunan	PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting/ Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 37.201.000,-	Rp. 23.946.000 (64.37%)	Kegiatan ini tidak bisa dimaksimalkan karena untuk kegiatan promosi tidak dilaksanakan lagi karena PPKM, dan silpa kegiatan ini disebabkan honor THL tidak bisa dibayarkan karena THL tersebut sudah dirumahkan	Kegiatan ini untuk selanjutnya sebaiknya difokuskan untuk rapat penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	
---	-------------	---------------------	---------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	--	--	--

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembentukan panitia landreform Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021	SK nomor : 188.45/658/BUP-PASBAR/2021 tanggal 25 November 2021	Penyelesaian konflik lahan perkebunan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dinas Perkebunan agar melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan produksi komoditi unggulan Kabupaten Pasaman Barat seperti Kelapa sawit, kakao/ coklat, Kopi, nilam, Karet dan lain lain	1. Percepatan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2. Pengadaan bibit kopi dan pinang hibrida	1. Mengganti tanaman varietas non unggul dengan varietas yang unggul dan bersertifikat 2. Memperbaiki produktivitas kelapa sawit 3. Meningkatkan luas tanam kopi dan pinang dalam rangka peningkatan produksi di masa yang akan datang
2.	Kami rekomendasikan agar Dinas Perkebunan menggali dan meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat terutama yang berkaitan dengan Perusahaan di Pasaman Barat	Memperbaiki/ merawat kebun TKD Muara Kiawai agar hasil lelang lebih tinggi	Meningkatnya PAD dari Rp.85.000.000,- per bulan menjadi Rp.110.000.000,- per bulan

3.	Pada Dinas Perkebunan perlu dibuatkan program dan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet terutama pengadaan kecambah, sebagai upaya perbaikan kualitas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet masyarakat yang sudah harus diremajakan	Melakukan MoU dengan PPKS Medan dalam penyediaan kecambah agar mudah diperoleh petani	Memperoleh performa tanaman TBM dan TM yang baik sehingga kesejahteraan petani/pekebun meningkat
----	--	---	--


KEPALA,
H. EDRIZAL
 Pembina Utama Muda / IV. c
 NIP. 19640218 199302 1 001